

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kode etik jurnalistik menjadi hal yang penting untuk diterapkan media dan awak media dalam menyajikan berita-beritanya. Namun demikian, faktor dari ketatnya persaingan antar media khususnya media siber menyebabkan media-media siber semakin ditekan untuk dapat menghasilkan berita yang lebih cepat dan menarik sehingga semakin lalai dalam menerapkan kode etik jurnalistik. Mengambil sampel berita-berita topik pencabulan di SINDOnews.com periode Agustus 2018, peneliti menemukan beberapa berita yang masih tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, dan dalam kesempatan ini peneliti berpedoman kepada Pedoman Media Siber.

Permasalahan umum yang ditemukan peneliti pada enam sampel berita adalah ketidakberimbangan isi berita dan penggunaan bahasa yang mengandung unsur sadis dan cabul. Selain itu, pada dua berita ditemukan penyebutan identitas korban yang masih dibawah umur yang menunjukkan bahwa kesadaran SINDOnews.com akan perasaan susila korban objek pemberitaan masih dipertanyakan.

Berbanding terbalik dengan hasil penemuan, salah satu redaktur SINDOnews.com dalam wawancara yang dilakukan peneliti mengungkapkan bahwa penulisan berita dengan mengandung unsur sadis dan cabul sangatlah dilarang oleh SINDOnews.com, apalagi sampai mengarahkan pembaca ke dalam imajinasinya terkait perbuatan asusila. Penyebutan identitas korban juga dilarang oleh SINDOnews.com. Apabila ada berita yang demikian, seorang redaktur akan mendapatkan teguran dari pemimpinnya karena seorang redaktur merupakan yang paling bertanggungjawab atas berita yang diterbitkan. Seorang redaktur diibaratkan sebagai penyortir/penyeleksi sebuah berita yang dikirim reporternya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian berita terhadap kode etik jurnalistik,

maka redakturlah yang bertanggungjawab untuk membenarkan berita tersebut.

Sayangnya, upaya SINDOnews.com dalam memantau berita-beritanya masih terbilang tidak maksimal. Pasalnya, dalam memantau berita-beritanya, mereka hanya menunggu komplain dari masyarakat. Selama tidak ada komplain, berita-berita yang diterbitkan dianggap tidak bermasalah. Karena tidak adanya komplain, SINDOnews.com menganggap bahwa berita-berita yang mereka terbitkan kian diminati masyarakat, terbukti dari jumlah pembacanya yang semakin meningkat setiap harinya. Berita-berita kriminal seperti pencabulan pun menjadi berita ke-tiga paling diminati pembaca. Karenanya, SINDOnews.com menggunakan bahasa-bahasa yang cukup sensasional seperti sadis dan cabul untuk dapat menarik pembaca, yang pada akhirnya akan memberikan mereka keuntungan dan semakin membesarkan SINDOnews.com. Mewakili SINDOnews.com, salah satu redaktur yang peneliti wawancarai mengaku bahwa yang terpenting dari sebuah berita adalah jumlah pembaca.

Menanggapi hal ini, pihak Dewan Pers yang peneliti wawancarai kemudian setuju bahwa SINDOnews.com telah melanggar kode etik jurnalistik. Salah satu faktor penyebab hal tersebut adalah karena rendahnya kompetensi awak media dalam menjalani profesinya. Padahal, sebuah media memiliki fungsi sosial dalam mengedukasi masyarakat.

Pihak Dewan Pers mengaku bahwa mereka memiliki keterbatasan dalam memantau keseluruhan berita dari tingginya jumlah media di Indonesia, khususnya media siber. Dewan Pers memerlukan bantuan dari masyarakat untuk mengadukan pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik yang terjadi. Namun kenyataannya, kesadaran masyarakat akan hal ini masih rendah, dan kembali kepada penjelasan sebelumnya: media memiliki fungsi sosial dalam mengedukasi masyarakat.

Masyarakat tidak dapat sepenuhnya salah dalam hal ini, karena pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat masih terbilang rendah. Media, dengan fungsi sosialnya sebagaimana yang disebutkan pada Teori Normatif

Media bahwa media massa sebagai penyalur informasi secara meluas tidak hanya memiliki efek objektif, namun juga memiliki tujuan sosial, seharusnya mampu untuk mengedukasi masyarakat. Namun sebaliknya, karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, media menyajikan konten-konten tidak berkualitas yang menyesuaikan tingkat pendidikan masyarakat dan malah menyebabkan moral masyarakat semakin menurun.

Melihat keadaan seperti ini, Dewan Pers tentu tidak hanya diam. Dewan Pers memfasilitasi media-media dan awak media dalam meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan verifikasi media. Dewan Pers juga memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan pengaduan melalui fitur pengaduan *online* di situsnya. Tak ada lagi halangan bagi masyarakat dan pihak media untuk dapat saling bekerjasama memantau kualitas pers di Indonesia. Apabila kualitas pers di Indonesia baik, akan tercipta masyarakat yang baik pula.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti sempat merasakan hambatan pada proses menganalisa teks. Peneliti menyarankan kepada penelitian-penelitian selanjutnya untuk menganalisa teks secara lebih terstruktur dan lebih mendalam untuk mendapatkan hasil yang lebih lebih baik, khususnya dengan menggunakan model analisis wacana Van Dijk. Menganalisa teks dengan lebih terstruktur dan mendalam akan memudahkan penelitian menjadi lebih sistematis. Selain itu, dalam menggali informasi ketika wawancara, janganlah terpaku pada satu pertanyaan. Karena, informasi yang mendalam hanya akan dapat diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang lahir seiring berjalannya wawancara.

Selanjutnya, kepada SINDOnews.com dan seluruh media khususnya media siber diharapkan untuk dapat lebih mawas akan berita-berita yang diterbitkan. Karena, sebuah media memiliki tanggungjawab yang besar dalam rangka mewujudkan fungsi-fungsinya seperti fungsi edukasi

masyarakat. Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa jumlah pembaca merupakan “penghidup” dari sebuah media, namun tetap harus diperhatikan bahwa apa yang ada dalam media akan mempengaruhi masyarakat. Kepada awak media pun dianjurkan untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan Dewan Pers agar lebih kompeten dalam menjalani tugas jurnalistiknya.

Untuk pihak masyarakat, peneliti berharap agar masyarakat lebih peduli dan sadar akan pentingnya pers yang berkualitas. Masyarakat memegang kendali atas kehidupan pers. Apabila masyarakat masih tak acuh akan pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik yang terjadi, maka pelanggaran akan terus menerus terjadi dan berimbas kepada masyarakat itu sendiri. Karena, Pihak Dewan pers pun tidak dapat sepenuhnya mengontrol semua konten di seluruh media. Untuk itu, gunakan fasilitas pengaduan yang disediakan Dewan Pers dalam mengadukan pelanggaran kode etik jurnalistik yang ada.

Kepada pihak Dewan Pers juga diharapkan untuk dapat memberikan hukuman yang lebih tegas terhadap media-media yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik. Karena semakin mudah sebuah media terlepas dari kasus yang menjerat, semakin mudah pula bagi mereka (media) untuk melakukan kembali perbuatan yang sama. Selain itu, pemberian penghargaan kepada media-media yang berkualitas dan taat kepada kode etik jurnalistik juga akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi sebuah media dan dapat mendukung seluruh media untuk saling bersaing memperoleh penghargaan tersebut. Selain menjadikan media-media menjadi lebih kredibel, hal tersebut juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap media-media yang ada dan meningkatkan pengetahuan serta sikap masyarakat ke arah yang lebih baik atas hasil konten-konten positif yang dihasilkan media.